

PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Sri Yulianti Mozin¹, Siti Nurcahyati Abdussamad², I Nyoman Ade Saputra³

^{1,2,3}Univeritas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹yulmozin@ung.ac.id , ²sitinurcahyatiabd@ung.ac.id

³adejr83@gmail.com

Received: 18-11-2025

Revised: 29-11-2025

Approved: 15-12-2025

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang dipublikasikan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, penguatan kepercayaan publik, serta penurunan potensi penyimpangan anggaran. Selain itu, integrasi prinsip Good Governance, Agency Theory, dan New Public Management terbukti memperkuat efektivitas pengelolaan APBD melalui peningkatan keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan orientasi kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian keuangan publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: *transparansi, akuntabilitas, good governance, agency theory, new public management.*

Abstract

Regional financial management is a strategic aspect in supporting the effectiveness of government administration and improving the quality of public services. The principles of transparency and accountability are important elements in ensuring that the Regional Budget (APBD) is managed efficiently, honestly, and responsibly. This study aims to analyze the role of transparency and accountability in improving the quality of regional financial management. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) by analyzing national and international journal articles relevant to the topics of transparency, accountability, and regional financial management published over the past ten years. The results show that the implementation of transparency and accountability consistently contributes positively to improving regional financial performance, strengthening public trust, and reducing the potential for budget irregularities. In addition, the integration of the principles of Good Governance, Agency Theory, and New Public Management has been proven to strengthen the effectiveness of APBD management through increased information disclosure, oversight mechanisms, and performance orientation. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of public finance studies as well as practical recommendations for regional governments in strengthening transparent, accountable, and public interest-oriented financial governance.

Keywords: *transparency, accountability, good governance, agency theory, new public management.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara efisien, jujur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen yang sangat krusial. Transparansi membuka akses masyarakat

terhadap informasi anggaran, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara tepat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, terbuka, dan profesional menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kepercayaan publik serta peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Badewin et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, kajian Systematic Literature Review yang dilakukan oleh Jannah et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan determinan utama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya melalui digitalisasi dan standar pelaporan yang andal.

Meskipun demikian, praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal. Studi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal di Kota Pontianak mengungkapkan bahwa kedua variabel tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan adanya persoalan efektivitas alokasi anggaran dan lemahnya peran PAD sebagai sumber pembiayaan yang mandiri (Pratama et al., 2024). Temuan ini memperlihatkan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran yang kurang transparan berpotensi menghambat pencapaian kinerja keuangan yang ideal. Sejalan dengan hal tersebut, Oktari et al. (2024) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparatur pengelola keuangan. Selain itu, Swasti et al. (2025) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya keterbukaan informasi anggaran masih menjadi faktor penghambat optimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek penyusunan dan pengelolaan anggaran (Pangaribuan & Situmorang, 2024). Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, di mana pelaporan anggaran sering kali belum mencerminkan pertanggungjawaban secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam proses pengawasan keuangan daerah.

Selain faktor internal daerah, konteks kebijakan fiskal nasional turut memengaruhi kapasitas daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Kajian mengenai kebijakan subsidi dan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Ketidakseimbangan kebijakan fiskal serta lemahnya mekanisme pengawasan dapat berdampak pada stabilitas fiskal daerah dan menghambat efektivitas pengelolaan APBD (Nabilah & Addainuri, 2025). Tantangan struktural lain yang dihadapi daerah meliputi tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta belum meratanya kontribusi PAD antarwilayah. Kondisi ini menuntut penguatan desain kebijakan fiskal daerah, efektivitas belanja, dan sistem

pengawasan internal agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara sehat.

Lebih lanjut, praktik transparansi yang kuat juga berperan dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keterbukaan dokumen anggaran, pelibatan publik dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah membentuk ekosistem pengawasan sosial yang dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat integritas kelembagaan pemerintah daerah.

Di sisi lain, akuntabilitas yang efektif menuntut adanya sistem evaluasi kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini mencakup penyusunan indikator kinerja utama (IKU), standar pelayanan minimal (SPM), serta mekanisme audit internal dan eksternal yang independen. Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum, dan efisiensi. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban melaporkan, tetapi sebagai proses pembelajaran berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Secara konseptual, integrasi antara transparansi dan akuntabilitas membentuk fondasi utama bagi terwujudnya *trust building* antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kepercayaan publik bukan hanya hasil komunikasi yang baik, tetapi terbentuk melalui pengalaman nyata masyarakat dalam mengakses informasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan merasakan langsung dampak kebijakan anggaran. Oleh karena itu, penguatan kedua prinsip ini menjadi investasi jangka panjang bagi stabilitas pemerintahan daerah dan keberlanjutan pembangunan.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada tiga landasan utama. Prinsip *Good Governance* menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik (UNDP, 1997). *Agency Theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal berpotensi menimbulkan asimetri informasi, sehingga diperlukan mekanisme transparansi untuk meminimalkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, pendekatan *New Public Management* (NPM) menegaskan pentingnya orientasi kinerja, efisiensi, dan hasil dalam reformasi pengelolaan sektor publik (Hood, 1991). Ketiga kerangka teori tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat kualitas pengelolaan APBD secara menyeluruh.

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dalam penelitian ini dipilih karena mampu menyajikan sintesis bukti ilmiah secara sistematis, transparan, dan terstruktur dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola umum, inkonsistensi temuan, serta celah penelitian (research gaps) yang belum banyak dikaji, khususnya terkait implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses seleksi literatur yang ketat, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mampu mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Selain itu, penting ditekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi budaya birokrasi. Praktik keterbukaan informasi anggaran mendorong perubahan perilaku aparatur dari pola kerja yang tertutup menjadi lebih

partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, akuntabilitas mendorong adanya tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga setiap keputusan anggaran tidak hanya dipertimbangkan dari sisi kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sisi manfaat sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan transparansi dan akuntabilitas juga berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi lokal. Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi anggaran dan kinerja pemerintah, maka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan menjadi lebih terbuka. Hal ini berpotensi menciptakan mekanisme check and balance yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola temuan, kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah secara objektif dan terstruktur. Pendekatan SLR dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk merangkum temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis keterkaitan antara prinsip *Good Governance*, *Agency Theory*, dan *New Public Management* (NPM) dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Data penelitian bersumber dari artikel jurnal nasional dan internasional yang diperoleh melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal open access lainnya. Artikel yang ditelusuri berkaitan dengan kata kunci antara lain *transparansi*, *akuntabilitas*, *pengelolaan keuangan daerah*, *good governance*, *agency theory*, dan *new public management*. Artikel yang digunakan dalam penelitian ini dipublikasikan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, dengan tujuan memperoleh temuan empiris yang relevan dan mutakhir. Selain itu, jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang telah melalui proses peer-review untuk menjamin kualitas dan kredibilitas sumber data.

Proses SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu: Identifikasi Literatur Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran awal terhadap berbagai artikel jurnal menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap ini menghasilkan sejumlah artikel potensial yang berkaitan dengan topik penelitian. Penyaringan (Sreening) Artikel yang telah diidentifikasi kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Artikel yang tidak relevan dieliminasi pada tahap ini. Evaluasi Kelayakan (Eligibility) Artikel yang lolos tahap penyaringan selanjutnya dianalisis secara lebih mendalam melalui pembacaan teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Analisis dan Sintesis Data Artikel terpilih dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, *good governance*, *agency theory*, dan *new public management*. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan bahwa paradigma *Good Governance* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Menurut Ananti et al. (2025) Tata kelola keuangan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan secara sistematis dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sektor publik, tata kelola keuangan merupakan bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip transparansi yang diusung UNDP tidak sekadar dipahami sebagai keterbukaan administratif, melainkan sebagai upaya sistematis pemerintah daerah dalam menyediakan informasi fiskal yang komprehensif, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh publik. Praktik ini mencakup publikasi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, hingga laporan kinerja perangkat daerah. Literatur menunjukkan bahwa daerah yang konsisten menjalankan keterbukaan informasi cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan kapasitas pengawasan masyarakat yang lebih kuat.

Penelitian Ardiansyah et al. (2024) menegaskan bahwa praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan publik masih menghadapi kendala kapasitas aparatur dan lemahnya kultur organisasi yang mendukung keterbukaan. Meskipun regulasi telah mengatur keterbukaan informasi, implementasi di tingkat daerah seringkali bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya substantif. Penelitian Kaka et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* seringkali belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem kerja birokrasi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak cukup hanya diatur dalam regulasi, tetapi membutuhkan penguatan budaya organisasi dan komitmen pimpinan daerah. Oleh karena itu, dalam konteks *good governance*, transparansi dan akuntabilitas harus dipahami sebagai bagian dari reformasi struktural dan kultural yang berkelanjutan.

Selain transparansi, dimensi akuntabilitas dalam *Good Governance* dipahami sebagai kewajiban substantif untuk mempertanggungjawabkan hasil, bukan sekadar proses. Artinya, pertanggungjawaban tidak berhenti pada kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan seberapa jauh program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan Nurlaili et al. (2025) memperkuat bahwa penguatan kapasitas aparatur terutama dalam perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan pelaporan berbasis kinerja berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, *Good Governance* dalam konteks ini berfungsi sebagai fondasi etis dan struktural yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Lebih jauh, SLR menunjukkan bahwa penerapan instrumen digital seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-procurement* memperkuat prinsip transparansi dalam praktik. Sistem digital bukan hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang memudahkan pengawasan internal dan eksternal. Hal ini secara tidak langsung mengurangi peluang terjadinya manipulasi anggaran, praktik korupsi, serta penyimpangan prosedural. Oleh karena itu, kerangka *Good Governance* dalam temuan penelitian ini dapat dipahami sebagai kombinasi antara norma tata kelola yang baik dan dukungan sistem kelembagaan yang memungkinkan keterbukaan berjalan secara efektif.

Selain berfungsi sebagai prinsip normatif, *Good Governance* dalam hasil SLR juga menunjukkan perannya sebagai instrumen penguatan legitimasi pemerintah daerah. Keterbukaan informasi anggaran tidak hanya meningkatkan akses publik, tetapi juga membentuk relasi kepercayaan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat. Daerah yang secara konsisten mempublikasikan dokumen fiskal dalam format yang mudah dipahami masyarakat awam cenderung memiliki tingkat konflik sosial yang lebih rendah dan tingkat penerimaan kebijakan publik yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan strategi pemerintahan untuk membangun stabilitas sosial dan politik.

Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap penyimpangan. SLR menunjukkan bahwa daerah dengan sistem keterbukaan yang terintegrasi seringkali mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan anggaran. Artinya, transparansi bekerja tidak hanya secara reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga secara preventif. Dalam konteks ini, kontrol sosial oleh media dan masyarakat sipil menjadi aktor penting dalam ekosistem tata kelola keuangan yang sehat.

hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang menentukan kualitas tata kelola keuangan daerah. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam pengelolaan sektor publik. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa transparansi sering kali bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi penggunaan anggaran secara substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* tidak cukup hanya didukung oleh regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Agency Theory Sebagai Penghubung Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Dalam perspektif *Agency Theory*, pengelolaan keuangan daerah diposisikan sebagai relasi kontraktual antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Hasil SLR menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam relasi ini adalah ketimpangan informasi yang bersifat struktural, di mana pemerintah memiliki akses dan kontrol penuh terhadap data anggaran, sementara masyarakat hanya menerima informasi dalam bentuk yang terbatas dan sering kali bersifat formalistik. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya moral hazard, penyimpangan alokasi anggaran, serta praktik oportunistik yang sulit terdeteksi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Saragih et al. (2025) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berperan dalam mendukung efektivitas keterbukaan informasi anggaran.

Penelitian Basniwati & Rahmadani (2025) mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pelaporan keuangan menyebabkan rendahnya kualitas pengawasan publik dan membuka ruang penyimpangan anggaran. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa transparansi fiskal berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan risiko moral hazard dan perilaku oportunistik aparatur. Penelitian dalam Zakaria et al. (2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas yang lemah tidak hanya berdampak pada potensi penyimpangan, tetapi juga menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengawasan dan perencanaan pembangunan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi anggaran, maka posisi mereka sebagai prinsipal menjadi lemah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus dipandang sebagai instrumen penguatan relasi antara pemerintah dan public.

Temuan Juliyanti et al. (2025) memperlihatkan bahwa lemahnya mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa menyebabkan tingginya risiko penyimpangan, pengambilan keputusan tidak transparan, dan rendahnya kualitas output pembangunan. Studi Nupsi et al. (2025) melengkapi temuan ini dengan menunjukkan bahwa rendahnya akuntabilitas berdampak langsung pada menurunnya partisipasi publik. Masyarakat menjadi pasif karena merasa tidak memiliki akses terhadap informasi dan tidak memiliki saluran efektif untuk mengontrol kebijakan fiskal pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi fiskal dipahami sebagai alat korektif untuk mengurangi dominasi informasi oleh pihak agen dan memperkuat posisi tawar prinsipal.

Lebih jauh, SLR menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam kerangka *Agency Theory* harus dipahami secara multidimensi, yaitu mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai tujuan; akuntabilitas administratif memastikan bahwa prosedur dijalankan secara benar; sedangkan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa program menghasilkan dampak yang terukur. Ketiga dimensi ini bekerja sebagai sistem pengendalian internal yang mampu menekan perilaku oportunistik dan memperkuat pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik (*value for money*).

Dalam perspektif *Agency Theory*, penjelasan tidak berhenti pada konsep asimetri informasi, tetapi juga menyentuh aspek *accountability pressure*. Hasil SLR menunjukkan bahwa ketika mekanisme pelaporan dan pengawasan diperkuat, perilaku agen (pemerintah daerah) cenderung lebih berhati-hati dan rasional dalam mengambil keputusan anggaran. Transparansi menciptakan tekanan psikologis dan institusional bagi aparatur untuk menghindari tindakan oportunistik.

Selain itu, SLR mengungkapkan bahwa akuntabilitas bukan hanya mekanisme formal, tetapi juga budaya organisasi. Daerah yang memiliki budaya akuntabilitas yang kuat memperlihatkan adanya *self-control mechanism*, yaitu aparatur secara sadar menjaga integritas tanpa perlu tekanan eksternal yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Agency Theory* dalam praktik sangat bergantung pada internalisasi nilai etika dan profesionalisme dalam birokrasi.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat rentan terhadap masalah asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Keterbatasan akses informasi publik menyebabkan masyarakat sulit melakukan pengawasan secara optimal, sehingga membuka peluang terjadinya moral hazard dan perilaku oportunistik aparatur. Kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi fiskal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan informasi tersebut. Dengan menyediakan informasi anggaran yang lengkap, jelas, dan mudah diakses, pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengawasan publik. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik dan memberikan nilai manfaat yang nyata (*value for money*).

New Public Management Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan *New Public Management* (NPM) dalam hasil SLR menunjukkan pergeseran paradigma dari birokrasi tradisional menuju pengelolaan sektor publik yang lebih dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada kinerja. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa NPM menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja, sistem evaluasi berbasis indikator, serta pelaporan berbasis output dan outcome menjadi instrumen utama dalam implementasi paradigma ini.

Dari sudut pandang *New Public Management* (NPM), temuan SLR menunjukkan bahwa modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Masse et al. (2025) menekankan bahwa penerapan sistem informasi keuangan dan digitalisasi proses anggaran memiliki dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan serta peningkatan kualitas pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan manajerial yang menekankan inovasi dan teknologi merupakan strategi efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih terbuka.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip NPM mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Sistem *e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-monitoring* memungkinkan proses perencanaan dan pengawasan berjalan secara lebih transparan dan real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga mempersempit ruang praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Temuan Nurlaili et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dalam mengoperasikan sistem digital dan memahami manajemen kinerja merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi NPM.

Lebih lanjut, SLR menunjukkan bahwa NPM menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan (*service user*) yang memiliki hak untuk menilai kualitas kinerja pemerintah. Transparansi dalam konteks ini memberikan akses bagi publik untuk menilai apakah program dan kegiatan pemerintah benar-benar relevan, efektif, dan efisien. Akuntabilitas kemudian berfungsi sebagai mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan capaian tersebut. Dengan demikian, NPM tidak hanya memperkuat aspek manajerial, tetapi juga memperdalam demokratisasi tata kelola keuangan melalui keterlibatan publik secara lebih aktif dan bermakna.

Pendekatan NPM dalam temuan SLR juga memperlihatkan dimensi strategis dalam reformasi kelembagaan. NPM tidak hanya mendorong efisiensi operasional, tetapi juga mendorong perubahan cara berpikir aparatur dari *rule driven* menuju *result driven*. Perubahan ini secara langsung memengaruhi desain kebijakan anggaran, di mana program-program yang tidak berdampak signifikan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan program berbasis kebutuhan publik.

Selain itu, NPM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan hanya alat teknis, melainkan strategi transformasi organisasi. Sistem digital meningkatkan transparansi proses, memperkuat pengendalian internal, dan menciptakan budaya kerja yang lebih responsif. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam arsitektur tata kelola modern yang berbasis data dan kinerja.

hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi, orientasi kinerja, dan penggunaan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa adopsi sistem penganggaran berbasis kinerja, e-

budgeting, serta pelaporan keuangan berbasis hasil mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD. Pendekatan NPM mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada pencapaian output dan outcome pembangunan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan secara efektif, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Integrasi prinsip transparansi dan akuntabilitas terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, penguatan kepercayaan publik, serta penurunan potensi penyimpangan anggaran.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi *Good Governance* sebagai kerangka normatif, *Agency Theory* sebagai penjelas hubungan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat, serta *New Public Management* (NPM) sebagai pendekatan manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang efisien, berorientasi pada kinerja, dan berfokus pada kepentingan publik. Dengan demikian, penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan internal dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Secara keseluruhan, integrasi ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah akan berjalan lebih efektif ketika pemerintah daerah membuka akses informasi, mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran, serta mengadopsi inovasi manajerial. Penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan penyimpangan, dan memastikan bahwa anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur, memperluas digitalisasi sistem keuangan, dan meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi agar prinsip *Good Governance*, *Agency Theory*, dan NPM dapat berjalan efektif dalam praktik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pengawasan independen menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas publik dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih profesional.

REFERENSI

- Ananti, A., Harmain, H., & Daulay, A. N. (2025). *Analisis tata kelola keuangan kantor dukcapil kota binjai berdasarkan perspektif good governance*. 14(03), 1291–1306.
- Ardiansyah, M. I., Khairiah, A., Sitepu, A. M., Simanjorang, M., & Supraja, G. (2024). Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Mendukung Kualitas Laporan

- Keuangan Pemerintah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 55–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25348>
- Badewin, E. R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–15.
- Basniwati, A. D., & Rahmadani. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 314–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.198>
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00384.x>
- Jannah, R., Haliah, & Nirwana. (2025). Transparency and Accountability in Local Government Financial Reporting: A Systematic Literature Review. *Social Science International Journal*, 4(1), 1–18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). Peran akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di sekretariat daerah kabupaten sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 375–386.
- Kaka, A. A. L. A. R., Rozari, P. E. De, & Tungga, C. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang. *Journal Of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1947–1962.
- Masse, N., Igirisa, I., & Nani, Y. N. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 1089–1095.
- Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (2025). Peran Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 59–75.
- Nupsi, Kresnawati, & Nasution, S. (2025). The Effect Of Village Government Accountability And Transparency On Community Participation In Village Infrastructure Development. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 23–38. 3. Nupsi, Kresnawati, Suswati Nasution.pdf
- Nurlaili, F., Ilmi, Y. F., & Maharani, E. (2025). Literature review pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. *Faletahan Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 28–39.
- Oktari, R., Solikhin, A., & Dahmiri. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 13(2), 101–115.
- Pangaribuan, J., & Situmorang, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Administrasi & Kebijakan (JRAK)*, 10(1), 1–19.
- Pratama, D. P., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2013-2022. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 720–732. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1609>
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance and Sustainable Human Development*. UNDP.

- https://digitallibrary.un.org/record/130207/files/DP_NDP_1997-11-UN.pdf
- Saragih, S., Sari, D., & Irfan, M. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 45–60.
- Swasti, R., Hartono, & Yulianto. (2025). Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Contemporary Economics and Economic Journal*, 6(1), 25–40.
- Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 41–47.